

Kajian Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban

ABSTRAK

Ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan PAD dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Tuntutan untuk meningkatkan PAD semakin besar sesuai dengan semakin banyaknya pelimpahan dari kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui retribusi dan pajak daerah sebagai bagian dari PAD. Hingga akhir 2018 sudah terealisasi Rp414.860.154.401,29. Capaian ini mendekati target sebesar Rp417.268.516.865,10 (99,42 %). Adapun kekurangan (0,58 %) adalah lain-lain PAD yang sah. pajak daerah tahun 2018 ditarget Rp192.476.223.110, dan terealisasi Rp198.612.726.581 atau 103,19 persen. Meskipun kenaikan PAD dari tahun ke tahun cukup signifikan, namun dari sisi kemandirian pembiayaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kenaikan PAD tentu saja diharapkan dapat memperbaiki kemandirian Kabupaten Tuban dalam membiayai pembangunan di berbagai sektor, sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah penataan aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia pengelola dan pemberdayaan masyarakat dan komunitas.